



RENCANA KERJA | 2023

KEPUTUSAN CAMAT CIJULANG
KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor : 050/Kpts.18.1-Kec/2022
TENTANG PENETAPAN
RENCANA KERJA
KECAMATAN CIJULANG
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN CIJULANG
Jalan Raya Cijulang No. 248 Tlp/Fax (0265) 2640296
Cijulang 46394



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

KECAMATAN CIJULANG

Jalan Raya Cijulang No. 248 Tlp/Fax (0265) 2640296 Cijulang 46394

KEPUTUSAN

CAMAT CIJULANG

KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor : 050/Kpts. 18.1-Kec/2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA

KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan bertanggungjawab maka perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Rencana Kerja Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan



- antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang

- Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran

- Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
 41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
 42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);
 43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 48);
 44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 55).

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Mengesahkan Rencana Kerja Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Rencana Kerja Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. |
| KETIGA | : | Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran adalah sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. |
| KEEMPAT | : | Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya. |

Ditetapkan di : Cijulang
Pada tanggal 26 Juli 2022
CAMAT CIJULANG



Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Bupati Pangandaran.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran.
4. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT CIJULANG
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/Kpts.18.1-Kec/2022
TANGGAL : 26 Juli 2022

**PENETAPAN RENCANA KERJA
KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

- A. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
1. Kecamatan Cijulang
- B. Sistematika Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan sistematika sebagai berikut :
- I. Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 1.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan
- IV. Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- V. Penutup



- C. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Cijulang Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Pangandaran telah sesuai dengan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

KAMAT CIJULANG

KECAMATAN
CIJULANG
Hj. AYIROHANAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Penetapan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran untuk Tahun anggaran 2023.

Penetapan Rencana Kerja (Renja) ini merupakan langkah awal penentuan indikator kinerja yang dapat terukur secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai gambaran tingkat pencapaian dan tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Dalam penyusunan Penetapan Rencana Kerja (Renja) ini kami berupaya semaksimal mungkin walaupun dalam prosesnya selalu mengalami hambatan serta keterbatasan, harapan kami semoga Penetapan Rencana Kerja (Renja) ini dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya pencapaian hasil yang terbaik untuk tiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Penetapan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ini, kami sadari masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan didalamnya, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya serta kami mengharap ada masukan ataupun saran yang membangun guna perbaikan dan peningkatan dalam penyusunan Penetapan Rencana Kerja (Renja) di masa yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Penetapan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ini dapat menjadi media informasi yang berguna serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada Kantor Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

Cijulang, 28 Juli 2022
CAMAT CIJULANG

Dra. Hj. AYU ROHANAH, M.Pd
NIP. 19671014 199512 2 002



DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
KPTS CAMAT	i
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATARBELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KINERJA SKPD TAHUN LALU	9
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD.....	9
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD	14
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD ...	14
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD	15
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	21
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH.....	22
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI	22
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN CIJULANG.....	23
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	24
BAB IV. RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	33
BAB V. PENUTUP.....	36



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817). Peraturan tersebut secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2023, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran maka disusunlah Rencana Kerja Kecamatan Cijulang tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Cijulang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70);
43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 48);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 55).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pangandaran yang telah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RENJA) untuk tahun 2023 yang merupakan dokumen awal Perencanaan Kecamatan Cijulang untuk periode 1 (satu) tahun dimaksudkan untuk menguraikan kegiatan-kegiatan Kecamatan Cijulang secara sistematis mulai dari sasaran dan pembiayaan sesuai program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja dan rencana tingkat pencapaian (target) secara langsung yang dapat

terukur sebagai tindakan nyata dalam waktu satu tahun, yang selanjutnya dijadikan sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan tahunan di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian Program dan Kegiatan pelayanan Kantor Kecamatan Cijulang;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Kecamatan Cijulang;
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen Rancangan Akhir perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Rencana Kerja, landasan hukum penyusunan Rencana Kerja, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja dan sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja.

- 1.1 Latarbelakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap Rancangan Akhir RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD;

	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III		TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
		Bab ini telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, serta Program dan Kegiatan.
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
	3.3	Program dan Kegiatan
BAB IV		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V		PENUTUP
		Berisikan uraian penutup, berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun tugas dan fungsi Kecamatan adalah :

- a) Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
- b) Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok seperti di atas.
- d) Melaksanakan tugas-tugas ketata usahaan.
- e) Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan.
- f) Melaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran dapat dilihat rinciannya yang disajikan dalam Tabel T-C.29 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kecamatan Cijulang, sebagai berikut :

TABEL T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Pangandaran

Kecamatan Cijulang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Unsur Kewilayahan									
7.01	Kecamatan Cijulang									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%							
		2. Persentase laporan kemajuan dengan kualitas baik	100%							
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	100%							
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%							
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100%							
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	100%							
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%							
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	84 Dokumen	15	7	7	100%	14		43%

	Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah							36	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%							
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang / Bulan	9	9	8	89%	11	28	37%
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360 Dokumen	60	60	60	100%	60	180	50%
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30 Laporan	3	1	1	100%	-	4	13%
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100%						-	0%
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	305 Laporan	12	12	12	100%	-	24	8%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%							
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	60 Dokumen	12	12	12	100%	12	36	60%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%						-	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1	28	1	4%	1	3	50%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1	180	165	92%	1	167	2783%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	288 Paket	48	48	48	100%	48	144	50%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penerbitan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Penerbitan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	36	36	36	100%	60	132	37%

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.956 Laporan	80	326	2	1%	326	408	21%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%							
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.440 Laporan	60	240	10	4%	240	380	22%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	2	2	2	100%	24	28	19%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	4	12	11	92%	4	19	79%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%							
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	5	5	4	80%	5	14	44%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	3	14	3	21%	14	20	29%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	-	1	1	100%	-	1	20%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%							
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%							
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60 Laporan	-	12.00	4	33%	-	4	7%

7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%							
7.01.02.2.02.01	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	4	12	10	83%	4	18	90%
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%							
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%							
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20 Dokumen	4	12	10	83%	4	18	90%
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5 Dokumen	1	2	2	100%	-	3	60%
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	4	12	10	83%	4	18	90%



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian Kinerja Kecamatan Cijulang berdasarkan sasaran strategis dilakukan dengan perbandingan antara target dengan realisasi kinerja Tahun 2022, sasaran dari capaian kinerja meliputi :

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.30 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cijulang
Kabupaten Pangandaran

No	Indikator	SPM/ Standar dan Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi				Capaian Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Jumlah Pelayanan Pembuatan e-KTP	100 %	%	21.645	21.645	21.645	21.645	21.645	21.645	548	1.172	80 %	80 %	80 %	80 %	
2.	Jumlah Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	100 %	%	11.373	11.373	11.373	11.373	11.373	11.373	1.332	1.009	85 %	85 %	85 %	85 %	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cijulang bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pangandaran;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam

penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company / Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu SPM (Standar Pelayanan Minimal) dimana pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat mencapai MDGs (Millenium Development Goals);
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Arah Kebijakan dan potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Cijulang harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD dapat diketahui dari pencapaian realisasi anggaran pada tahun 2021 yaitu 80.83%, hal tersebut menandakan bahwa pelaksanaan terhadap Rancangan Akhir dapat direalisasikan dengan baik. Dalam menunjang pelaksanaan Rancangan Akhir RKPD menurut identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan setelah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai.

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.31 : Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 Kecamatan Cijulang.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Pangandaran

Nama SKPD : Kecamatan Cijulang

Tabel T-C.31

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kecamatan Cijulang				2,466,253,531.00	Kecamatan Cijulang				1,891,793,170.00	
	Program Peningkat Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	2,074,576,446.00	Program Peningkat Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	1,789,590,575.00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	55,958,100.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	31,000,000.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Cijulang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	55,958,100.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Cijulang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	31,000,000.00	Baru
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100 Persen	1,430,924,548.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100 Persen	1,315,914,564.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Cijulang	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/Bulan	1,349,896,448.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Cijulang	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/Bulan	1,264,028,684.00	Baru
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	55,958,100.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	31,000,000.00	Baru
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	2,255,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	855,440.00	Baru

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 Laporan	22,825,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 Laporan	20,030,440.00	Baru
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	55,958,100.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	31,000,000.00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	55,958,100.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 Laporan	31,000,000.00	Baru
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik	100 Person	95,712,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik	100 Person	76,850,000.00	
Pengadaan Pakuan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Cijulang	Jumlah paket pakuan dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	10,500,000.00	Pengadaan Pakuan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Cijulang	Jumlah paket pakuan dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	9,450,000.00	Baru
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Cijulang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 Dokumen	25,212,000.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Cijulang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 Dokumen	17,400,000.00	Baru
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Cijulang	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	60,000,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Cijulang	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	50,000,000.00	Baru
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100 Person	110,339,763.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100 Person	93,784,746.00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Cijulang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	2,933,730.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Cijulang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	2,907,947.00	Baru
Penyediaan Perlengkapan dan Perawatan Kantor	Kec. Cijulang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	33,000,000.00	Penyediaan Perlengkapan dan Perawatan Kantor	Kec. Cijulang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	18,457,221.00	Baru
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Cijulang	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	10,091,824.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Cijulang	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	10,087,000.00	Baru
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Cijulang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Paket	6,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Cijulang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Paket	4,590,000.00	Baru
Penyediaan Bahan / Material	Kec. Cijulang	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket	2,500,000.00	Penyediaan Bahan / Material	Kec. Cijulang	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket	2,023,578.00	Baru

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	326 Laporan	55,814,200.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Cijulang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	326 Laporan	55,719,000.00	Baru
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100 Persen	30,902,277.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100 Persen	31,143,456.00	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec. Cijulang	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	17,902,277.00	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec. Cijulang	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	31,143,456.00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Cijulang	Jumlah unit sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12 Unit	13,000,000.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Cijulang	Jumlah unit sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12 Unit		Baru
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100 Persen	215,568,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100 Persen	154,837,415.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Cijulang	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	240 Laporan	2,400,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Cijulang	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	240 Laporan	2,405,000.00	Baru
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Cijulang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 Laporan	48,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Cijulang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 Laporan	38,600,000.00	Baru
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Cijulang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan	165,168,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Cijulang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	113,832,415.00	Baru
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100 Persen	79,213,658.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100 Persen	55,060,394.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Cijulang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	5 Unit	63,913,658.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Cijulang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	5 Unit	43,060,394.00	Baru
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Cijulang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	14 Unit	13,650,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Cijulang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	14 Unit	10,500,000.00	Baru
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Cijulang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit	1,650,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Cijulang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit	1,500,000.00	Baru
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	303,870,000.00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	28,760,000.00	

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Person	277,032,000.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Person	-	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Cijulang	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	12 Laporan	277,032,000.00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Cijulang	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	12 Laporan	-	Baru
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Person	26,838,000.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Person	20,760,000.00	
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Cijulang	Jumlah laporan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	4 Laporan	26,838,000.00	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Cijulang	Jumlah laporan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	4 Laporan	20,760,000.00	Baru
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	9,065,175.00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	2,795,000.00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Person	9,065,175.00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Person	2,795,000.00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Cijulang	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga	9,065,175.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Cijulang	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga	2,795,000.00	Baru
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	78,741,910.00	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	78,647,595.00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 Person	78,741,910.00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 Person	78,647,595.00	
	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Cijulang	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	4 Dokumen	26,838,000.00	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Cijulang	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	4 Dokumen	20,760,000.00	Baru
	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Cijulang	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	1 Dokumen	25,065,910.00	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Cijulang	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	1 Dokumen	37,127,595.00	Baru

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Cijulang	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	4 Laporan	26.838.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Cijulang	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	4 Laporan	20.760.000,00	Baru
---	---------------	--	-----------	---------------	---	---------------	--	-----------	---------------	------

Cijulang, 28 Juli 2022
 Kecamatan Cijulang

Dra. Hj. AYE ROHANAH, M.Pd
 NIP. 19671014 199512 2 002

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2023, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kantor Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan musrenbang kabupaten.

Penelaahan / review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat dalam bentuk hasil musrenbang untuk Kecamatan Cijulang tidak ada usulan.

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.32 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Pangandaran**

Kecamatan Cijulang

Tabel T-C.32

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
<i>NIHIL</i>					

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam Ranhir RKPD, yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2023 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Cijulang dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

b. Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten

Visi & Misi Bupati Pangandaran 2021-2026

Visi :

“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak pada Nilai Karakter Bangsa”

Misi :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama;
2. Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan;
3. Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan;
4. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi local;
5. mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel;
6. Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

1. Kolaborasi Membangun Desa;
2. Optimalisasi Pengelolaan Potensi Pariwisata;
3. Optimalisasi Sektor Ekonomi Unggulan, UMKM, IKM, Koperasi dan Kualitas Tenaga Kerja;
4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Sumber Pendanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik;
5. Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana;
7. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah, Sistem Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Pendidikan, Keagamaan, kepemudaan dan Olahraga.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Cijulang

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Cijulang mempunyai arah yang dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan : 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

- Sasaran** : a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
b. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Publik
c. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Cijulang maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berjalan 2022 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

A. Tahun Anggaran 2022 :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan :
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi sub kegiatan :
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, meliputi kegiatan :
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi sub kegiatan :
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

B. Tahun Anggaran 2023 :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum;
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan :
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi sub kegiatan :
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi sub kegiatan :
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi kegiatan :
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi sub kegiatan :
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
- 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, meliputi kegiatan :
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi sub kegiatan :
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.33 : Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 Dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Kecamatan Cijulang

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Pangandaran

Nama SKPD : Kecamatan Cijulang

Tabel T-C.33

Kode	Ususan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.	Sumber Dana (APBD)		Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Unsur Kewilayahan				1,891,793,170.00				2,075,972,487.00
7.01	Kecamatan Cijulang				1,891,793,170.00				2,075,972,487.00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				1,789,590,575.00				1,963,549,632.50
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		100 Persen	31,000,000.00			100 Persen	34,000,000.00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Cijulang	4 Dokumen	31,000,000.00	APBD KAB.	Baru	13 Dokumen	34,000,000.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik		100 Persen	1,315,914,564.00			100 Persen	1,447,506,020.40
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Cijulang	10 Orang/Bulan	1,264,028,684.00	APBD KAB.	Baru	13 Orang	1,390,431,552.40

7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Cijulang	5 Dokumen	31,000,000.00	APBD KAB.	Baru	14 Orang	34,100,000.00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec. Cijulang	1 Laporan	855,440.00	APBD KAB.	Baru	15 Orang	940,984.00
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kec. Cijulang	5 Laporan	20,030,440.00	APBD KAB.	Baru	16 Orang	22,033,484.00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		12 Laporan	31,000,000.00			61 Buah	34,100,000.00
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kec. Cijulang	12 Laporan	31,000,000.00	APBD KAB.	Baru	12 Laporan	34,100,000.00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik		100 Persen	76,850,000.00			100 Persen	79,535,000.00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. Cijulang	1 Paket	9,450,000.00	APBD KAB.	Baru	1 Paket	10,395,000.00
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Kec. Cijulang	1 Dokumen	17,400,000.00	APBD KAB.	Baru	1 Dokumen	19,140,000.00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kec. Cijulang	10 Orang	50,000,000.00	#REF!	Baru	10 Orang	50,000,000.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik		100 Persen	93,784,746.00			100 Persen	103,163,220.00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kec. Cijulang	1 Paket	2,907,947.00	APBD KAB.	Baru	1 Paket	3,198,741.70

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Cijulang	1 Paket	18,457,221.00	APBD KAB.	Baru	1 Paket	20,302,943.10
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan pengadaan yang disediakan	Kec. Cijulang	1 Paket	10,087,000.00	APBD KAB.	Baru	1 Paket	11,095,700.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kec. Cijulang	1 Paket	4,590,000.00	APBD KAB.	Baru	1 Paket	5,049,000.00
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kec. Cijulang	1 Paket	2,023,578.00	APBD KAB.	Baru	1 Paket	2,225,935.80
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Cijulang	326 Laporan	55,719,000.00	APBD KAB.	Baru	326 Laporan	61,290,900.00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi		100 Persen	31,143,456.00			100 Persen	34,257,801.60
7.01.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kec. Cijulang	5 Unit	31,143,456.00	APBD KAB.	Baru	5 Unit	34,257,801.60
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kec. Cijulang	12 Unit	0.00	APBD KAB.	Baru	12 Unit	0.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan		100 Persen	154,837,415.00			100 Persen	170,321,156.50
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Cijulang	240 Laporan	2,405,000.00	APBD KAB.	Baru	240 Laporan	2,645,500.00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kec. Cijulang	24 Laporan	38,600,000.00	APBD KAB.	Baru	241 Laporan	42,460,000.00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kec. Cijulang	12 Laporan	113,832,415.00	APBD KAB.	Baru	242 Laporan	125,215,656.50
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi		100 Persen	55,060,394.00			100 Persen	60,566,433.40

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	Kec. Cijulang	5 Unit	43,060,394.00	APBD KAB.	Baru	5 Unit	47,366,433.40
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	Kec. Cijulang	14 Unit	10,500,000.00	APBD KAB.	Baru	14 Unit	11,550,000.00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec. Cijulang	1 Unit	1,500,000.00	APBD KAB.	Baru	1 Unit	1,650,000.00
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100%	20,760,000.00			100%	22,836,000.00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 Persen	0.00			100 Persen	0.00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Kec. Cijulang	12 Laporan	0.00	APBD KAB.	Baru	12 Laporan	0.00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100 Persen	20,760,000.00			100 Persen	22,836,000.00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Cijulang	4 Laporan	20,760,000.00	APBD KAB.	Baru	4 Laporan	22,836,000.00
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	2,795,000.00			100%	3,074,500.00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 Persen	2,795,000.00			100 Persen	3,074,500.00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Cijulang	7 Lembaga	2,795,000.00	APBD KAB.	Baru	7 Lembaga	3,074,500.00

7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	78,647,595.00			100%	86,512,354.50
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		100 Persen	78,647,595.00			100 Persen	86,512,354.50
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	Kec. Cijulang	4 Dokumen	20,760,000.00	APBD KAB.	Baru	4 Dokumen	22,836,000.00
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	Kec. Cijulang	1 Dokumen	37,127,595.00	APBD KAB.	Baru	1 Dokumen	40,840,354.50
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan	Kec. Cijulang	4 Laporan	20,760,000.00	APBD KAB.	Baru	4 Laporan	22,836,000.00



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Cijulang Tahun Anggaran 2023 program dan kegiatannya di jelaskan dalam RKA Kecamatan Cijulang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 1.789.590.575,-, membidangi :
 - Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, meliputi :
 - ✚ Sub Kegiatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan berupa fasilitasi operasional pengelola perencanaan.
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi :
 - ✚ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berupa penyediaan anggaran gaji dan tunjangan ASN;
 - ✚ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD berupa pembayaran honorarium non ASN;
 - ✚ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun berupa laporan dokumen tahunan (CALK);
 - ✚ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulana/Triwulanan/Semesteran SKPD berupa laporan setiap bulan, pertiga bulanan dan perenam bulanan.
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, meliputi :
 - ✚ Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD berupa fasilitasi operasional pengelolaan asset.
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi :
 - ✚ Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya berupa pengadaan sarana dan prasarana SDM aparatur;
 - ✚ Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian berupa fasilitasi pengelolaan kepegawaian;
 - ✚ Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi berupa Workshop/Bimtek/Pelatihan bagi ASN.
 - Kegiatan Administrasi Umum, meliputi :
 - ✚ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa penyediaan alat listrik yang dibutuhkan;
 - ✚ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa alat tulis kantor yang dibutuhkan;
 - ✚ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan untuk memperbanyak data – data yang dibutuhkan;
 - ✚ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa penyediaan koran dan majalah yang diperlukan;

- ✚ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material berupa pengadaan bahan/material untuk bangunan kantor;
 - ✚ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa penyediaan dana perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi :
 - ✚ Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pengadaan PC, Laptop, Printer, dll;
 - ✚ Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berupa pengadaan tong sampah, neon box, dll.
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi :
 - ✚ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dalam bentuk mengagenda surat masuk dan surat keluar serta mengirimkan surat ke Desa/Dinas/Instansi terkait;
 - ✚ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa penyediaan wifi dan penerangan kantor serta tersedianya air bersih;
 - ✚ Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa pembayaran honorarium pelayanan Paten, Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan, dan Mamin.
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi :
 - ✚ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan berupa pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan tahunan;
 - ✚ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa perbaikan / service peralatan kantor;
 - ✚ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berupa pembyaran tenaga harian lepas.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Rp 20.760.000,-, membidangi :
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi :
 - ✚ Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait berupa pelaksanaan kegiatan leaning sektor.
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi :
 - ✚ Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan berupa kegiatan pelayanan masyarakat secara optimal.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Rp 2.795.000,-, membidangi :
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi :

- ✚ Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa berupa pelaksanaan kegiatan monitoring musrenbang Desa.
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp 78.647.595,-, membidangi :
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi :
 - ✚ Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa berupa pembinaan terkait pengadministrasian di Desa;
 - ✚ Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif berupa pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat Kecamatan;
 - ✚ Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan berupa pembinaan terkait perekonomian dan pembangunan di Desa.

Dalam hal pendanaan agar pelaksanaan Rencana Kerja yang sudah ditentukan berjalan dengan lancar dan anggaran tersebut terdapat dalam RKA Kecamatan Cijulang Tahun 2023, dalam pelaksanaan program dan kegiatan seluruhnya menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Demikian Penetapan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran disusun yang merupakan Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif selanjutnya akan terus dijabarkan kedalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah mengacu pada Visi, Misi, arah dan sasaran sehingga dapat dijadikan pedoman bagi seluruh kepentingan yang menjadi media untuk mensinergiskan arah, sasaran dan tahapan dalam melaksanakan Pembangunan, selanjutnya yang nantinya akan dievaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/Kegiatan di masa yang akan datang. Sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan

Selain itu dukungan dari semua pihak terutama jajaran staf Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas di berbagai bidang (pendayagunaan sumber daya aparatur) dapat dihadapi secara bersinergi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya, Rencana Kerja bukan mutlak tetapi harus dievaluasi secara periodik dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Pangandaran. Agar pendayaguna aparatur Negara Khususnya di Lingkungan Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran nantinya dapat mewujudkan Kecamatan Cijulang yang terdepan dalam agribisnis dan destinasi wisata yang mendunia dengan tetap mempertahankan agama sebagai pandangan hidup di tahun 2025, dengan rencana Kabupaten Pangandaran untuk **“MEWUJUDKAN KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA”**.

Cijulang, 28 Juli 2022
Camat Cijulang

Dra. Hj. AYTIROHANA, M.Pd
NIP. 19671014 199512 2 002



L A M P I R A N



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN KECAMATAN CIJULANG

Jalan Raya Cijulang No. 248 Tlp/Fax (0265) 2640296 Cijulang 46394

DAFTAR HADIR

Kegiatan : Breafing Staf
Tanggal : 25 Juli 2022
Waktu : 08.00 WIB s.d 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Cijulang

No	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
1	Hj. Aji Rohanah	Camat	Kec. Cijulang	
2	Unay. 6	Sebut	Kec. Cijulang	
3	M. Y. ...	Korir P...n	Kec. Cijulang	
4	Krona-S	Kon. ...	Kec. Cijulang	
5	Deni Hermiyanti	op perencanaan	"	
6	NEM HERLINA	Ketubg Ciuman	Kec. Cijulang	
7	Dasy. Setyantri	Kasubus FEU	Kec. Cijulang	
8	Sudh. pr			
9	Enin. 5	PD	"	
10	Wawan Setiawan	Op Potan	Kec. Cijulang	
11	MUMU TANFIR S	Op BMP	"	
12	Rita - R	"	"	
13	Tini Mistrawati	Op. Perencanaan	"	
14	Santi. Fitriani	Staf	Kec. Cijulang	
15	Tuti H	"	"	
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Camat Cijulang
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN CIJULANG
Dra. Hj. Aji ROHANAH, M.Pd
NIP. 1967014 199512 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
KECAMATAN CIJULANG

Jalan Raya Cijulang No. 248 Tlp/Fax (0265) 2640296 Cijulang 46394

NOTULEN

- Program geber pangaji, setiap hari rabu pukul 07.30 wib
- Apel pagi dilaksanakan setiap hari, mulai berlaku dari bulan Januari tahun 2023.
- Memperingati kirlangkala akan dilaksanakan berbagai lomba
- Tim monitoring ketamatan agar aktif mendampingi desa, supaya PBB dapat segera wnas.
- Pembuatan dokumen penetapan renja tahun 2023 supaya dapat segera disusun
- Agar segera dibuat SK Tim penetapan renja tahun 2023
- Program yang akan di usulkan untuk tahun 2023, yaitu:
 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
 3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
 4. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Cijulang, 25 Juli 2022

Notulen

DENI HERMITANTI

DOKUMENTASI

